

**Efektivitas Kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan
Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Peguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

ANDRE LOFIKA PEGI
TM/NIM : 2015/15042054

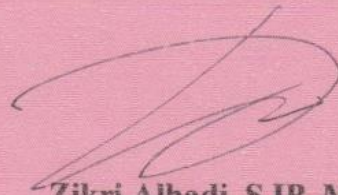
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) dalam
Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang
Nama : Andre Lofika Pegi
Nim/TM : 15042054/2015
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Zikri Alhadi, S.IP.,MA.
19621109 198602 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019 Pukul 09:00 s/d 10.00 WIB

**Efektivitas Kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan
Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang**

Nama : Andre Lofika Pegi

Nim : 15042054

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2019

Tim Penguji

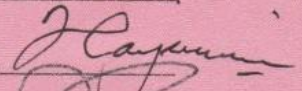
Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Zikri Alhadi, S.IP, MA.

1. 

2. Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si

2. 

3. Anggota : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum., Ph.D

3. 

Mengetahui
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Lofika Pegi

Nim/TM : 15042054/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Lima Kaum, 29 September 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Efektivitas Kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padan” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Andre Lofika Pegi

15042054/2015

ABSTRAK

Andre Lofika Pegi

**:Efektivitas Kinerja Palang Merah
Indonesia dalam Melakukan
Pengurangan Risiko Bencana di Kota
Padang**

Pembimbing

: Zikri Alhadi , S.IP., M.A

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena Kota Padang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi sehingga juga diberikan gelar “Market Bencana”. Oleh sebab perlu perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi hal ini. Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah pada fase pra bencana yaitu pengurangan risiko bencana. Salah satu lembaga atau organisasi yang bersangkutan dengan penanggulangan bencana adalah organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau biasa disebut dengan PMI. PMI merupakan lembaga semi pemerintah yang telah memiliki Undang-Undang sendiri yaitu UU No 1 Tahun 2018 tentang kepalang merahan. Dalam Undang-Undang tersebut PMI bertugas membantu pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugasnya tersebut masih banyak kendala yang ditemukan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah mengetahui keefektifan kinerja PMI dalam melakukan pengurangan resiko bencana di Kota Padang dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dimiliki PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana sehingga dapat dicarikan solusinya terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Markas PMI Kota Padang, Kantor BPBD Kota Padang, ahli pengurangan resiko bencana, pengamat kebencanaan, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, kemudian dengan tokoh masyarakat yang ada di Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan cara menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dipakai dalam artikel ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Palang Merah Indonesia (PMI) dalam melakukan pengurangan resiko bencana sudah bagus namun belum optimal karena masih kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengurangan risiko bencana, organisasi yang bersifat relawan dan prasarana yang kurang lengkap. Solusi yang dapat diberikan yaitu membuat kegiatan yang menarik partisipasi masyarakat, panggaran dana dari pemerintah, meningkatkan profesional kinerja dan menyusun program secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga mempermudah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Kata kunci: Efektivitas, PMI, Pengurangan Resiko Bencana.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Palang Merah Indonesia dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang”**. Shalawat berserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zikri Alhadi, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ganefri Ph.D selaku rector Universitas Negeri Padang yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalankan studi di perguruan tinggi tersebut.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Zikri Alhadi, S,IP., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Kepada Staf Dosen serta Karyawan/karyawati Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Staf Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Pegawai perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial serta Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua (Bapak Syahriyal dan Ibu Emi Infirahmi), Adik Tercinta (Wiranda Wulandari dan Ari Pranata) yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda sampai memperoleh gelar Sarjana.
11. Teman-teman seperjuangan, Taufik Cool, Raup Baliang, Mbah Ronal, Ridwan Ajo Sicincin, dan Irfan MK yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar dengan penulis serta saling berbagi ilmu selama 4 tahun terakhir di Fakultas Ilmu Sosial.

12. Teman-teman satu pembimbing yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Penulis, Juli 2019

Andre Lofika Pegi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II Kajian Kepustakaan.....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Kosep Efektivitas	11
2. Konsep Kinerja.....	18
3. Konsep Analisis SWOT	26
4. Konsep Penanggulangan Bencana	28
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisa Data	45
H. Teknik Keabsahan Data.....	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 54
A. Temuan Umum	54
1. Gambaran Umum Kota Padang	54
2. Gambaran Umum PMI Kota Padang	56
B. Temuan Khusus	62
1. Efektivitas Kinerja PMI dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang	57
2. Analisis SWOT PMI dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang	67
3. Upaya PMI Untuk Meningkatkan Kinerja dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang	77
C. Pembahasan	80
 BAB V PENUTUP	 93

A. Kesimpulan	93
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kota Padang	49
Tabel 4.2 Jumlah dan Kepadatan Peduduk Kota Padang	50
Tabel 4.3 Daftar Kelompok Siaga bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) ...	68
Tabel 4.4 Daftar Perlengkapan Marakas PMI Kotang Padang	58
Tabel 4.5 daftar Jumlah Anggota PMI Kota Padang 6 Bulan Terakhir Tahun 2019	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Markas Kota Palang Merah Indonesia Padang	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 foto perlengkapan untuk penanggulangan bencana PMI Kota Padang

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang unik banyak mengandung potensi baik itu sosial budaya, sumber daya alam dan juga potensi bencana. karena dari bentuk dan letak geografisnya. Sehingga Indonesia juga memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Berdasarkan letak geografis tersebut Indonesia terletak diantara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia dan juga diapit oleh dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang sangat berpengaruh sekali yaitu letak geologisnya. Bonawati (2014) menjelaskan, Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu: pegunungan Mediterania di barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api aktif serta rawan terjadinya letusan gunung api dan gempa bumi. Berdasarkan letak geografis dan letak geologi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai potensi bencana yang dimiliki, kemudian bencana lainnya seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor, tentunya akan menyebabkan kerugian.

Bencana menurut Undang Undang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan suatu gejala alamiah dan non alamiah yang sangat meresahkan masyarakat akibat hilangnya kenyamanan, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya (Dedi, 2012) .

Salah satu provinsi yang memiliki risiko yang sangat tinggi dan rawan terhadap bencana adalah Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari sepuluh tahun terakhir telah terjadi dua kali bencana besar yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan dan kerugian. Tercatat pada tahun 2009 tanggal 30 September terjadi bencana gempa berkekuatan 7,6 SR dengan pusat gempa sebelah barat kota Pariaman. Gempa ini tidak menimbulkan tsunami akan tetapi menyebabkan longsor dan menimbun tiga desa di Kabupaten Padang Pariaman. Total korban meninggal dunia adalah sekitar 1.117 jiwa dan total kerugian adalah 19,2 triliun. Kemudian pada 25 Oktober 2010 terjadi bencana gempa dan tsunami di Mentawai dengan kekuatan 7,2 SR pada kedalaman 10 km. Pada peristiwa kali ini 530 orang tercatat hilang dan meninggal dunia, sementara kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam ini adalah sebesar 349 milyar (Dedi, 2012) .

Sumatera barat merupakan provinsi yang terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera, bentuk alamnya terdiri dari dataran rendah arah bagian barat berbatasan dengan pantai dan dataran tinggi vulkanik yang di sebut dengan bukit barisan. Sumatera Barat memiliki ibu kota yang terlatak pada bagian barat pantai Pulau Sumatera yaitu Kota Padang. Kota Padang merupakan kota yang bersentuhan langsung dengan Samudera Hindia, dilihat dari letaknya tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan Kota Palu yang dilanda gempa dan tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 silam. Akan tetapi perbedaannya, dimana Kota Palu bersentuhan langsung dengan Samudera Pasifik.

Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Sumatera Barat adalah bencana gempa bumi, jika gempa bumi tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar, maka akan berpotensi terjadinya gelombang tsunami. Salah satu hal yang

menjadi kecemasan masyarakat Sumatera Barat khususnya di Kota Padang adalah rentetan gempa yang mengguncang Sumbar pada minggu awal Februari 2019. gempa terjadi hingga puluhan kali.

Hal ini mesti disikapi serius karena dikhawatirkan guncangan gempa ini mempercepat pelepasan segmen Mentawai Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan mencapai 8,9 Skala Richter dan menimbulkan tsunami setinggi 8-10 meter. Hal ini dikemukakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami di Kantor Gubernur yang di hadiri oleh Kepala BNPB, BPBD, BMKG dan stakeholder yang bersangkutan. Untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut, maka perlunya perhatian serius dari pemerintah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sehingga upaya pengurangan terhadap risiko bencana dapat dilaksanakan. (Padang Ekspres)

Selain bencana gempa dan tsunami, kota Padang juga sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Seperti yang terjadi pada tanggal 2, November 2018 menyebabkan dua orang tewas dan sejumlah rumah rusak. Penyebab dari bencana tersebut adalah akibat dari intensitas hujan yang terlalu tinggi dan meluapnya Sungai Baringin (Kompas.com). Seperti yang dijelaskan diatas begitu kompleksnya peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera Barat terutama Kota Padang, maka pemerintah Kota Padang perlu melakukan penilaian kinerja bagi organisasi atau lembaga yang bersangkutan dengan penanggulangan bencana sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun manajemen kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana dan juga untuk pembangunan

berkelanjutan. Sehingga dampak dan kerugian dari bencana dapat di minimalisir serta tujuan dari penanggulangan bencana dapat terselenggara dengan baik.

Dampak atau risiko dari suatu bencana akan menyebabkan kerugian bagi suatu negara, salah satunya adalah terhambatnya laju pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat yang terkena bencana dimulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain merupakan tugas pemerintah sebagai lembaga formal, dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi non pemerintah atau *non government organization*. Salah satu lembaga atau organisasi yang bersangkutan dengan penanggulangan bencana adalah organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau biasa di sebut dengan PMI. Kenapa penulis ingin meneliti tentang PMI dan disini timbul pertanyaa apakah PMI juga termasuk dimensi kajian Administrasi Publik?

Ahmad (2015) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi Publik menerangkan bahwa. Sekitar tahun 80-an berkembang konsep yang berlabel baru untuk memberdayakan konsep ilmu administrasi publik. Konsep tersebut antara lain ada yang menyebut *New Public Administration* (Bellone, 1980), *The New of Organizations* (Ramos, 1981), dan terakhir sekitar 1990-an muncul konsep yang disebut *New Public Management* (Ferlie, 1996). Pada hakekatnya berupaya untuk mencerahkan konsep Ilmu Administrasi Negara. Gerald Caiden (1982) mengatakan: administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana

orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Harmon dan Mayer: pelaku utama dalam penyelenggaraan administrasi publik adalah administrator publik, birokrat, atau pegawai negeri. Mereka ini yang dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Namun karena proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar birokrasi pemerintah (seperti pekerja sosial, LSM, Ormas, dan lain-lain), maka sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan berdampak kepada masyarakat luas juga menjadi pusat perhatian administrasi publik. Dari penjelasan di atas begitu luas dan banyak ruang lingkup dan kajian administrasi Negara. Maka dari itu tidak cukup satu dimensi yang dapat menjelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Jadi menurut penjelasan dimensi dan ruang lingkup administrasi negara tersebut maka PMI merupakan salah satu organisasi atau lembaga semi pemerintah yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan berdampak kepada masyarakat luas yang mampu memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

PMI merupakan organisasi kemanusiaan peduli sosial yang membantu tugas pemerintah dalam penanggulangan bencana, dan bersifat sukarela serta bertanggung jawab kepada pemerintah, yang didirikan oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 25 tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan. Selain bertugas sebagai pelayanan unit transfuse darah, PMI juga diberikan tugas dan tanggungjawab dalam

penanggulangan bencana yang di atur dalam Keputusan Presiden no 246 tanggal 29 November tahun 1963. Kemudian juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 22 huruf f tugas PMI yaitu membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan luar negeri. Namun dalam penanggulangan bencana, terutama untuk pengurangan resiko bencana pada fase pra bencana masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PMI, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah PMI Kota Padang.

Susunan Pengurus PMI Kota Padang Masa Bakti 2016-2019

Pelindung	: Walikota Padang
Ketua	: Mahyeldi, SP
Wakil Ketua Bid. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	: Zaiful Zakaria, SH
Wakil Ketua Bid. Penanggulangan Bencana dan Logistik	: Zulhardi. Z. Latif, SH, MM
Wakil Ketua Bid. PMR dan Sukarelawan	: Ramli Parna
Wakil Ketua Bid Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Unit Tranfusi Darah	: dr. Hj. Hafleziyani, M.Kes
Wakil Ketua Bid Hubungan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Keuangan	: Adib Alfikri, SE, M.Si
Sekretaris	: Hamdani, S.HI, MA
Wakil Sekretaris	: Afriwaldi, SH
Bendahara	: Ir. H. Masri Saun, MM
Anggota	: 1. Ns. Ezzedding, S, S. Kep : 2. Dodi P Tanjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua PMI Kota Padang Bidang PMR dan Relawan, Bapak Ramli Parna pada tanggal 1 Oktober 2018 menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana PMI diatur oleh protap dan tupoksi sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh PMI itu cukup

jelas. Untuk pengurangan resiko bencana memiliki beberapa program. Pertama yaitu pembinaan KSR (Krop Suka Rela) yang berada di masing-masing kampus dan itu bekerjasama dengan pihak kampus dengan melatih dan membekali para relawan dengan tekhnis-teknis kepalang merahan. Kedua sibat (siaga bencana berbasis masyarakat) yang berada di kelurahan-kelurahan, PMI berfungsi memberikan pelatihan dan materi tentang kepalang merahan serta tentang siaga bencana. Ketiga yaitu donor darah. Dalam menyiapkan kota padang yang tangguh bencana ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PMI Kota Padang. Pertama minimnya biaya yang diberikan untuk penanggulangan bencana sehingga banyak program yang dibuat tidak berjalan dengan baik. Kedua yaitu ketika adanya program sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan kepalangmerahan akan tetapi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih kurang sehingga tujuan dari program ini tidak tercapai. Masyarakat masih menganggap sosialisasi mengenai bencana ini tidak penting. Kemudian SDM yang terbatas terbatas disini adalah untuk jumlah relawan di PMI Kota Padang cukup banyak namun kesediaan relawan atau yang stay di markas masih kurang karena PMI bersifat organisasi relawan sehingga dalam kegiatannya tidak memaksa hanya bersifat sukarela”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan yang di hadapi oleh PMI dalam melakukan pengurangan resiko bencana adalah dalam pelaksanaan program, seperti soialisasi kurangnya partisipasi dari masyarakat kemudian, jumlah personil yang siap turun kelapangan masih minim karena hanya bersifat sukarela. Permasalahan lain yang dihadapi PMI adalah kurang koordinasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik itu koordinasi sesama anggota dan juga dengan lembaga atau organisasi lain yang sama-sama memiliki tugas terhadap penanggulangan bencana. Kemudian PMI juga tidak memiliki anggaran dalam melakukan pengurangan resiko bencana, selanjutnya peralatan dan perlengkapan yang masih kurang dan juga sudah ada yang rusak. Terakhir PMI Kota Padang masih kekurangan logistik untuk penanggulangan bencana tersebut logistik yang dimaksud disini yaitu kekurangan stok darah di PMI. Berdasarkan pada peristiwa gempa yang terjadi beberapa tahun yang silam dan bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya, PMI Kota Padang

langsung turun kelapangan memberikan bantuan untuk menyelamatkan korban bencana yang di mulai dengan pertolongan pertama pada korban bencana, pengungsian, mendirikan dapur umum, sampai pada kondisi sudah dinilai aman.

Dari penjelasan tersebut terlihat bagaimana vitalnya peran PMI dalam penanggulangan bencana dan perlu diperhatikan efektivitas kinerja PMI dalam penanggulangan bencana. Dalam penelitian ini yang menjadi berfokusnya yaitu, pengurangan risiko bencana oleh PMI Kota Padang sehingga menjadi topik permasalahan yang menarik untuk di bahas. kemudian Kota Padang berdasarkan letak geografisnya merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, maka pemerintah dan lembaga lainnya dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengurangan risiko bencana seperti mitigasi dan kesiapsiagaan. Salah satu lembaga tersebut adalah PMI Kota Padang. Oleh sebab itu perlu dilakukannya penilaian efektifitas kinerja PMI dalam pengurangan risiko bencana. Agar tujuan dari penyelenggaraan manajemen bencana itu tercapai sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kinerja PMI dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Padang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota PMI Kota Padang dalam penanggulangan bencana.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program prabencana seperti sosialisasi, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pengurangan risiko bencana
3. Kurangnya koordinasi PMI dengan BPBD Kota Padang sebagai sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana.
4. PMI tidak memiliki anggaran dana untuk melakukan penanggulangan bencana
5. Kekurangan Sumber Daya Manusia yaitu relawan dari segi kuantitas
6. Kekurangan perlengkapan dan peralatan serta kebutuhan logis untuk penanggulangan bencana.
7. Padang merupakan kota rawan bencana yang sangat tinggi sehingga perlunya perhatian khusus untuk pengurangan risiko bencana terutama yang dilakukan PMI Kota Padang.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas di peroleh dimensi permasalahan yang cukup luas. Namun penulis ingin memberikan batasan masalah secara jelas dan terfokus, karena menimbang waktu dan biaya yang terbatas, maka yang menjadi masalah objek penelitian hanya dibatasi pada “Efektifitas Kinerja PMI dalam melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas kinerja PMI dalam pengurangan risiko bencana di Kota Padang ?
2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang ?

3. Apa upaya PMI dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam pengurangan risiko bencana di kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang:

1. Efektivitas kinerja PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
2. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
3. Upaya PMI dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada mata kuliah manajemen kebencanaan dan perilaku organisasi.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Kota Padang sebagai acuan dan masukan bagi pemerintah Kota Padang terutama pada BPBD dan PMI Kota Padang itu sendiri. Masukan tersebut berupa informasi serta input positif yang bisa mendorong pemerintah dan perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan kinerja untuk pengurangan risiko bencana yang terjadi di daerah.